

Laporan Capaian Kinerja Sementara Triwulan II Tahun 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut :

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
1	Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan					
	Indikator 1.1 Pertumbuhan Ekonomi	Persen tase	5,3	5,3	5,12	96,60
	Indikator 1.2 Biaya Logistik	Persen tase	13,52% terhadap PDB	13,52% terhadap PDB	14,3% terhadap PDB	94,23
	Indikator 1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen tase	29,4% terhadap PDB	29,4% terhadap PDB	27,82% terhadap PDB	94,62
	Indikator 1.4 Rasio PDB Industri Pengolahan	Persen tase	20,8%	20,8%	18,66%	89,71
	Indikator 1.5 Devisa Pariwisata	USD	19,00-22,10 miliar	4,39 miliar	4,39 miliar	100
	Indikator 1.6 Rasio PDB Pariwisata	Persen tase	4,5% - 4,6%	1,07%	1,07%	100
	Indikator 1.7 Indeks Ketahanan Energi	Indeks	6,77	6,77	6,64	98,07
	Indikator 1.8 Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Indeks	43	43	43	100
2	Sasaran Strategis 2. Terkendalinya Tingkat Inflasi Nasional Sesuai dengan Fundamental Ekonomi					
	Indikator 2.1 Tingkat Inflasi	Persen tase	(2,5 ± 1)%	(2,5 ± 1)%	1,87	100
3	Sasaran Strategis 3. Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan					
	Indikator 3.1 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen tase	35%	35%	40,8%	116
	Indikator 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,5% - 5%	4,5% - 5%	4,76%	100
4	Sasaran Strategis 4. Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas					

	Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Indeks	3 dari 4 (Baik)	2 dari 4 (Baik)	2	100
5	Sasaran Strategis 5. Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan					
	Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	Indeks	3 dari 4 (Baik)	3 dari 4 (Baik)	3,53	117,67
6	Sasaran Strategis 6. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas					
	Indikator 6.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Nilai	90,77	90,77	90,77	100

* Masih bersifat prediksi berdasarkan target tahunan karena tidak dapat dipecah kedalam triwulan

** Masih menggunakan data triwulan sebelumnya

1

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pencapaian Sasaran Strategis 1: **Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan** ditunjukkan oleh pencapaian 8 (Delapan) indikator kinerja yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Biaya Logistik
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto
4. Rasio PDB Industri Pengolahan
5. Devisa Pariwisata
6. Rasio PDB Pariwisata
7. Indeks Ketahanan Energi
8. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Latar Belakang

Salah satu agenda pembangunan yang teramanatkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas tersebut didorong oleh capaian pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor mulai dari pertanian hingga jasa-jasa. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, seringkali terdapat isu dan masalah yang menghambat pertumbuhan pada masing-masing sektor serta tidak dapat diselesaikan antar Kementerian/Lembaga. Selain itu, hingga saat ini masih banyak kebijakan-kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi saling berbenturan satu sama lain atau overlapping. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diamanatkan pada RPJMN, maka diperlukan proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan

untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan peningkatan pendapatan nasional dalam periode tertentu, misalnya dalam kurun periode 1 tahun.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) yang terdiri atas PDB lapangan usaha dan PDB pengeluaran. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

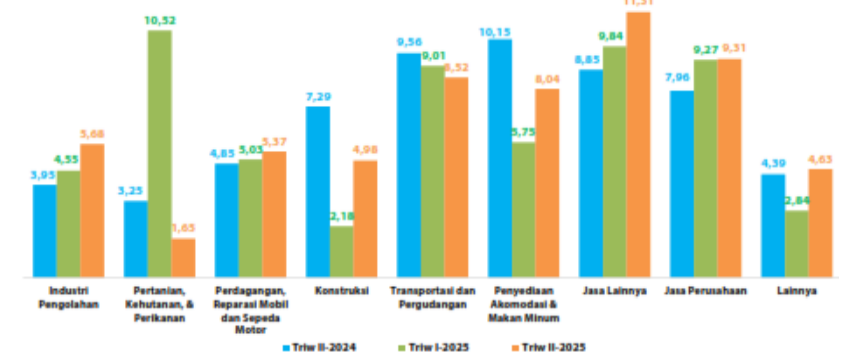
Hasil Pengukuran Kinerja

Target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 adalah sebesar 5,3% (yoy). Dalam proses perhitungan pertumbuhan ekonomi tahunan, BPS mengeluarkan realisasi pertumbuhan ekonomi secara triwulan. Meski dirilis secara triwulanan, perhitungan capaian indikator pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan capaian pertumbuhan ekonomi tahun ini dengan tahun sebelumnya. Capaian pertumbuhan ekonomi triwulanan menjadi pijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengawal target tahunan pertumbuhan ekonomi:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 1.1 Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,3	5,12	96,60

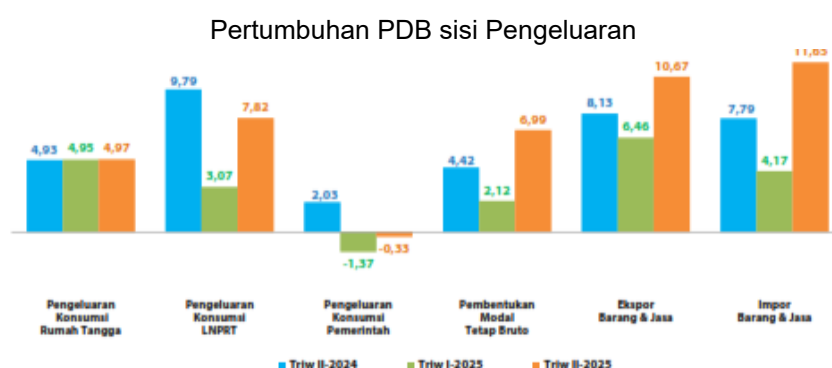
Data BPS menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2025 mencapai Rp 5.947,0 triliun. Jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen (q-to-q) jika melihat dengan triwulan sebelumnya. Ekonomi Indonesia triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2025 tumbuh sebesar 5,12 Persen (Y-on-Y). Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah jasa lainnya sebesar 11,31 persen; jasa perusahaan sebesar 9,31 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,52 persen; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,04 persen.

Pertumbuhan PDB Lapangan Usaha Y-on-Y



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran kecuali Komponen PK-P yang berkontraksi sebesar 0,33 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 10,67 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 7,82 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,99 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,97 persen; Kemudian Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang juga tumbuh sebesar 11,65 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara spasial, perekonomian Indonesia pada triwulan II-2025 beberapa kelompok provinsi mengalami penguatan pertumbuhan adalah Pulau Sulawesi sebesar 5,83 persen, tertinggi di Indonesia; diikuti Pulau Jawa sebesar 5,24 persen; dan Pulau Sumatera sebesar 4,96 persen. Sementara itu Pulau Kalimantan sebesar 4,95 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,73 persen; Pulau Maluku dan Papua sebesar 3,33 persen.



Struktur PDB Sisi Produksi

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha pada triwulan II-2025 didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 18,67 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,83 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,02 persen; Konstruksi sebesar 9,48 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,99 persen. Kontribusi kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,59 persen.

Struktur PDB Sisi Pengeluaran

Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 54,25 persen; diikuti oleh komponen PMTB 27,83 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,28 persen; Komponen PK-P sebesar 6,93 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 2,60 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,35 persen. Sementara itu, Komponen Impor Braang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang memiliki peran sebesar 20,66 persen.

Pulau Jawa masih mendominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 56,94 persen terhadap PDB nasional kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera dengan Kontribusi 22,20 persen, pulau Kalimantan dengan kontribusi 8,09 persen, pulau Sulawesi dengan kontribusi sebesar 7,21 persen, pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan kontribusi sebesar 2,83 persen, dan Maluku dan Papua dengan kontribusi sebesar 2,73 persen.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Pertumbuhan Ekonomi yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Sinkronisasi dalam bentuk permintaan data terkait Belanja Modal (Capex) BUMN kepada Kementerian BUMN.
- b. Sinkronisasi dalam terbitnya Permenko Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan KIPK; terbitnya Permenko Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Permenko Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
- c. Koordinasi dalam pelaksanaan penyaluran KUR 2025 Regional Sumatera.
- d. Pelaksanaan rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Semester II.
- e. Rapat Koordinasi optimalisasi penyaluran KUR; Rakor dengan Penyalur KUR terkait dengan optimalisasi KUR; Rakor Penyaluran KUR Khusus/Klaster.
- f. Monitoring kesiapan dan pelaksanaan giling tebu dengan PT Sinergi Gula Nusantara.
- g. Koordinasi dalam tindak lanjut inisiasi Pembentukan Indonesia Bullion Market Association (IBMA).
- h. Koordinasi dalam pertemuan dengan Sekretariat OECD untuk membahas perkembangan penyusunan IM serta persiapan OECD MCM 2025.
- i. Koordinasi dalam rapat terbatas Menko Perekonomian terkait progres penyusunan dokumen IM OECD.
- j. Koordinasi Bilateral dengan Sekretariat OECD terkait Teknis dengan K/L anggota bidang.
- k. Koordinasi dalam rangkaian pertemuan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-13 RI_Rusia bidang kerja sama perdagangan, ekonomi, dan teknis.
- l. Koordinasi pertemuan tingkat tinggi RI-Singapura dengan disepakatinya Joint Report Leaders to Retreat dalam forum Senior Official Meeting 6WG RI-Singapura. The 15th Indonesia-

- Singapore Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting.
- m. Koordinasi dalam penyelenggaraan forum bisnis Indonesia-Prancis dengan mendapatkan 10 MoU perjanjian kerja sama senilai USD 10 miliar.
 - n. Pelaksanaan penandatanganan Mou Indonesia – China terkait Twin Cities dan Supply Chain yang dilakukan antara Menko Perekonomian dengan Menteri Perdagangan RRT.
 - o. Pelaksanaan Cybersecurity Symposium dan Workshop dalam rangka kerja sama pengembangan SDM on Cybersecurity dengan RMIT Australia, Infinte Learning dan Innov8.
 - p. Pelaksanaan penandatanganan Joint Statement on Conclusion of Indonesia-EAEU FTA pada Forum SPIEF 2025.
 - q. Pengendalian berupa sosialisasi dan monitoring evaluasi melibatkan K/L terkait Implementasi Kebijakan DHE-SDA.
 - r. Koordinasi terkait penyelesaian kendala pencapaian target kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Pulau Sumatera.
 - s. Pengendalian berupa evaluasi pelaksanaan program belanja BINA Ramadhan & program BINA Back to School di Pulau Sumatera.
 - t. Koordinasi awal peningkatan Literasi Keuangan Konvensional bagi segmen Prioritas berupa sosialisai dan edukasi.
 - u. Koordinasi dalam FGD dengan stakeholder terkait pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/JETP.
 - v. Koordinasi antara Indonesia-Australia terkait rancangan Kemitraan untuk Infrastruktur dan Pembiayaan Iklim.
 - w. Koordinasi Pembahasan Konsep Memorandum of Understanding on Strengthening Economic Cooperation in Industrial and Supply Chains antara Indonesia dengan RRT.
 - x. Pelaksanaan KIAT Technical COmmittee Meeting untuk Infrastructure Funding and Financing Activity Stream dan Pelaksanaan Creative Infrastructure Financing (CreatIFF).
 - y. Pengendalian dalam evaluasi kawasan Industri RPJMN 2025-2029 dan PSN dalam RKP 2026.
 - z. Terlaksananya kegiatan FGD Pedoman KEK Hijau.

Kendala Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- a. Menurunnya konsumsi rumah tangga yang lesu dan daya beli menurun
- b. Tantangan global proteksionisme dan ekspor tidak merata
- c. Penyusutan kelas menengah dan informalitas ekonomi
- d. Tuntutan kriminal terhadap proyek investasi
- e. Ketidakpastian data dan kepercayaan ekonomi

Strategi dan Upaya Perbaikan

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 5,12 persen menjadi salah satu pendorong upaya Pertumbuhan

Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di triwulan selanjutnya. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan III tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a) Kebijakan mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli
- b) Kebijakan meningkatkan daya saing, mendorong investasi
- c) Kebijakan menjaga ketahanan sektor eksternal dan meningkatkan ekspor
- d) Kebijakan mendorong industri padat karya
- e) Kebijakan mendorong mobilitas masyarakat dan pariwisata

1.2 Biaya Logistik

Latar Belakang

Biaya Logistik adalah semua biaya yang berhubungan dengan proses pengiriman dan penyimpanan barang dari titik asal hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Dalam konteks bisnis, biaya logistik merupakan salah satu komponen krusial yang mempengaruhi harga barang dan efisiensi rantai pasok. Di Indonesia, biaya logistik masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan perusahaan penyedia jasa.

Menurut BAPPENAS bersama-sama dengan Kemenko Perekonomian dan BPS telah menyusun perhitungan biaya logistik secara Makro, dimana Biaya Logistik terdiri dari beberapa komponen biaya, yaitu:

1. Biaya Transportasi
2. Biaya Pergudangan
3. Biaya Penyimpanan Persediaan (Inventory)
4. Biaya Administrasi

Biaya Logistik merupakan faktor penting yang mempengaruhi daya saing suatu negara dalam perdagangan. Biaya logistik yang efisien memungkinkan penawaran harga yang lebih kompetitif, sebaliknya apabila biaya logistik tidak efisien akan mengakibatkan penawaran harga yang tinggi. Tingginya biaya logistik suatu negara dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika biaya logistik suatu negara terlalu tinggi dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), maka harga barang ekspor menjadi kurang kompetitif di pasar global.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Biaya Logistik merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Biaya Logistik nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Biaya Logistik

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target kinerja Biaya Logistik terhadap PDB pada tahun 2025 sebesar 13,52%, data kinerja terkait biaya logistik dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik secara tahunan. Untuk mengukur capaian kinerja adalah dengan membandingkan data biaya logistik tahun saat ini dengan tahun sebelumnya, adapun informawsi terkait biaya logistik ini masih bersifat sementara karena masih menggunakan data tahun sebelumnya mengingat data tahun terbaru belum dirilis. Berikut data angka sementara terkait biaya logistik:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-1.2 Biaya Logistik	Persen tase	13,52% terhadap PDB	14,3%*	94,23

*Angka Sementara

Pada Triwulan I tahun 2025, biaya logistik Indonesia tercatat berada pada kisaran 14,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan masih tingginya beban logistik nasional jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, yang umumnya telah berada di bawah 10 persen dari PDB. Meskipun terdapat tren penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya—di mana pada 2018 biaya logistik sempat mencapai 23,8 persen dari PDB—tantangan struktural dan operasional masih membebani sistem logistik nasional.



Berdasarkan dengan grafik diatas dapat dilihat terdapat perbaikan dari Tahun 2018 sampai dengan 2025, dimulai tahun 2018 dengan persentase Biaya Logistik Nasional terhadap PDB sebesar 23,8 persen kemudian terus mengalami perbaikan pada sistem logistik nasional sehingga pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 14,3 persen. Lonjakan biaya logistik pada periode triwulan ini terjadi disebabkan oleh adanya pembatasan mobilitas truk saat perayaan HBKN.

Tingginya biaya logistik nasional tersebut berdampak pada menurunnya daya saing produk nasional, baik di pasar domestik maupun ekspor. Biaya logistik yang tinggi menghambat efisiensi rantai pasok dan menurunkan minat investasi di sektor perdagangan dan manufaktur. Selain itu, ketidakefisienan distribusi juga menyebabkan disparitas harga antarwilayah, yang dapat memicu tekanan inflasi dan mengganggu kestabilan pasokan barang kebutuhan pokok.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Biaya Logistik yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Koordinasi rapat bilateral dalam rangka pembahasan Rencana Aksi RPenguatan Logistik Nasional. Rencana Aksi RPerpres mencakup 22 program, 25 sasaran program, 92 kegiatan, dan 179 keluaran.

- b. Koordinasi pertemuan IPEF SC Logistics and Movements Of Goods.
- c. Koordinasi dalam National Coordinator (NC) Master Plan on Asean Connectivity (MPAC) 2025.
- d. Koordinasi Chairperson Logistics and Transport Sectoral Services Working Group – Coordinating Committee on Services (LTSSWG – CCS) ASEAN tahun 2024-2025.
- e. Koordinasi dalam rapat one-on-one dengan pemangku kepentingan terkait khusus untuk indikator internasional yakni Ship Turnaround Time, Containel Dwell Time Import, dan Container Dwell Time Export.

Kendala Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- 1. Kondisi Geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan sehingga distribusi barang membutuhkan moda transportasi multimoda
- 2. Belum meratanya Infrastruktur logistik khususnya diluar pulau jawa
- 3. Belum optimalnya regulasi dan kebijakan yang telah diterapkan

Strategi dan Upaya Perbaikan

Biaya Logistik Nasional pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 14,3 persen menjadi salah satu pendorong upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di triwulan selanjutnya. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan II tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a. Melakukan revisi regulasi terkait dengan sistem logistik nasional
- b. Membangun infrastruktur yang mampu mendukung pengurangan biaya logistik terutama diluar pulau jawa
- c. Memberikan insentif fiskal terhadap pelaku usaha logistik serta menyederhanakan birokrasi terkait dengan perizinan.

1.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Latar Belakang

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan barang konsumsi, mencakup bangunan, mesin dan peralatan. PMTB meliputi investasi produsen dalam aset tetap selama periode tertentu, termasuk penambahan nilai aset yang tidak diproduksi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 24 jenis barang modal yang termasuk PMTB, yaitu:

- 1. Bangunan Tempat Tinggal
- 2. Bangunan bukan tempat tinggal
- 3. Konstruksi lainnya
- 4. Mesin pembangkit dan penggerak mula
- 5. Peralatan informasi dan telekomunikasi
- 6. Mesin lainnya
- 7. Pesawat terbang dan sejenisnya
- 8. Kapal dan sejenisnya
- 9. Kereta api dan sejenisnya
- 10. Kendaraan bermotor
- 11. Alat pengangkut lainnya
- 12. Ternak besar
- 13. Hewan lainnya
- 14. Tanaman perkebunan
- 15. Tanaman buah-buahan dan hortikultura lainnya

16. Tanaman lainnya
17. Barang-barang dari kayu, rotan & bambu
18. Peralatan dari logam
19. Barang dari kain & kulit
20. Peralatan laboratorium, instrumen optik & alat ukur
21. Peralatan kedokteran dan kesehatan
22. Peralatan lainnya
23. Produk kekayaan intelektual
24. Biaya pemindahan kepemilikan aset tak diproduksi

Beberapa manfaat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto yang dapat memberikan pengaruh positif bagi negara, antara lain:

- Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki peran sangat penting bagi negara karena menjadi penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dan menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang lebih tepat termasuk kebijakan pengalokasian anggaran dan investasi sehingga mampu mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- Peningkatan PMTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena investasi dalam aset tetap (seperti infrastruktur, mesin, dan peralatan) dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi.
- Berguna sebagai dasar dalam menyusun strategi bisnis bagi pihak swasta, karena memberikan informasi tentang posisi dan kondisi perekonomian suatu wilayah Negara dan menjadi perkiraan dalam menentukan nilai investasi.

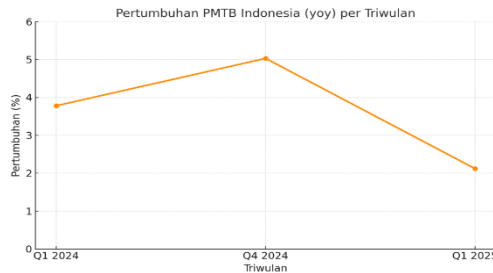
Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDB pada tahun 2025 adalah sebesar 27,82 persen. Hingga saat laporan kinerja disusun, pengukuran IKU Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Triwulan II tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
Indikator 1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persentase	29,4	27,82	94,62

Pada triwulan II tahun 2025, kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencatat pertumbuhan sebesar 6,99 persen (yoy). Capaian ini menunjukkan adanya akselerasi peningkatan bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (triwulan I 2025) yang sebesar 2,12 persen (yoy), maupun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu triwulan II 2024 sebesar 4,42 persen (yoy).



Perlambatan pertumbuhan PMTB ini dipengaruhi oleh meningkatnya kehati-hatian investor dalam melakukan ekspansi, yang tercermin dari sikap "wait and see" terhadap kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian. Hal ini

berdampak pada melambatnya realisasi investasi, terutama pada sektor bangunan dan konstruksi.

Meski demikian, secara umum PMTB masih tumbuh positif, terutama didorong oleh peningkatan impor barang modal seperti mesin dan perlengkapan. Sub-komponen mesin dan perlengkapan mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 30,37 persen (yoy), sementara investasi bangunan tumbuh lebih moderat, tetapi terjadi kenaikan juga pada impor barang modal yang tumbuh sebesar 28,16 persen (yoy) seiring peningkatan kebutuhan investasi sektor industri dan infrastruktur.

Dari sisi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, PMTB menyumbang 2,06 persen poin dari total pertumbuhan PDB Indonesia triwulan II 2025 yang sebesar 5,12 persen (yoy). Sumbangan ini lebih rendah dibandingkan kontribusi konsumsi rumah tangga dan ekspor, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode ini lebih didorong oleh sektor konsumsi dan perdagangan luar negeri.

Secara keseluruhan, kinerja PMTB pada awal tahun 2025 mencerminkan dinamika investasi domestik yang masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, serta perlunya penguatan keyakinan pelaku usaha untuk mendorong pemulihan investasi dalam jangka menengah.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang telah ditetapkan, antara lain:

- Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan hilirisasi komoditas strategis bersama Bappenas dalam rangka mendukung investasi.
- Pengendalian berupa monitoring dan evaluasi terkait capaian investasi dan potensi hilirisasi strategis di Provinsi Jawa Barat.
- Koordinasi rapat terkait Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Pengendalian dalam monitoring pelaksanaan Survei Business Ready Indonesia (B-Ready).
- Koordinasi dalam membangun Prototype for a Generative AI-Based investment assistant untuk penyediaan informasi dan komunikasi dengan calon investor.

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Pembentukan Modal Tetap Bruto ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

- Adanya ketergantungan pada belanja modal pemerintah hal ini terlihat dari tingginya kontribusi belanja modal pemerintah terhadap peningkatan PMTB

2. Tantangan iklim usaha domestik, kendala birokrasi, perizinan, kepastian hukum, serta isu konsistensi kebijakan masih menjadi faktor penghambat daya tarik investasi.
3. Keterbatasan pembiayaan investasi

Strategi dan Upaya Perbaikan

Pembentukan Modal Tetap Bruto Indonesia pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 27,82 persen terhadap PDB. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan II tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a. Melakukan peningkatan kepastian regulasi terkait dengan investasi.
- b. Mempercepat akselerasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN)
- c. Peningkatan kolaborasi pusat dan daerah untuk mempromosi investasi

1.4. Rasio PDB Industri Pengolahan

Latar Belakang

Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Badan Pusat Statistik adalah ukuran ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur kinerja atau performa pembangunan, khususnya di bidang ekonomi makro. PDB merupakan ukuran ekonomi makro yang menggambarkan nilai total output akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh perekonomian dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun atau satu triwulan. PDB digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.

Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan (Manufacturing GDP) adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam suatu wilayah atau negara selama periode tertentu (biasanya per tahun atau triwulan). Industri Pengolahan ini mengubah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi. Sektor Industri Pengolahan di Indonesia menjadi salah satu penggerak utama ekonomi sehingga industri ini mampu menciptakan lapangan kerja dengan produktivitas relatif tinggi.

Rasio PDB Industri Pengolahan adalah persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu wilayah atau negara. Indikator ini mengukur sejauh mana sektor industri pengolahan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Rasio PDB Industri Pengolahan merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Rasio PDB Industri Pengolahan yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Rasio PDB Industri Pengolahan.

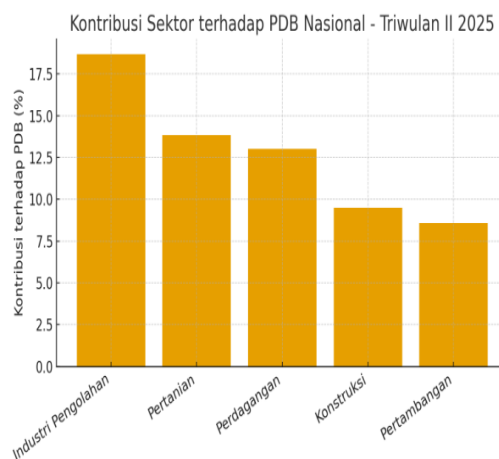
Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target Rasio PDB Industri Pengolahan adalah sebesar 20,8 persen pada tahun 2025. Hingga saat laporan kinerja disusun, pengukuran IKU Rasio PDB Industri Pengolahan pada Triwulan II tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
-------------------------	--------	--------------	-----------------	-----------

Indikator 1.4 Rasio PDB Industri Pengolahan	Persentase	20,8	18,66	89,71
--	------------	------	-------	-------

Pada triwulan II tahun 2025, sektor industri pengolahan tetap menunjukkan peran sentral dalam struktur perekonomian Indonesia. Sektor ini mencatat pertumbuhan sebesar 5,68 persen (year-on-year), yang menandai kesinambungan kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.



Dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), industri pengolahan memberikan sumbangan sebesar sekitar 1,13 poin persentase terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,12 persen (yoy) pada periode yang sama. Hal ini menjadikan industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam struktur PDB nasional, industri pengolahan tetap menjadi bagian dari lima sektor utama yang menyumbang lebih dari 63 persen total nilai tambah bruto nasional, bersama dengan sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan jasa lainnya. Ini mencerminkan konsistensi peran sektor manufaktur sebagai motor penggerak utama pembangunan ekonomi berbasis produksi.

Pertumbuhan positif sektor industri pengolahan didukung oleh kinerja subsektor unggulan, seperti makanan dan minuman, bahan kimia, serta barang logam dan alat angkut. Meskipun demikian, tantangan global seperti gangguan rantai pasok dan perlambatan permintaan eksternal masih menjadi faktor pembatas yang perlu diwaspadai.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Rasio PDB Industri Pengolahan yang telah ditetapkan, antara lain:

- Koordinasi rapat bilateral terkait MoU kerja sama pengembangan kendaraan listrik dengan kedutaan besar Australia.
- Koordinasi lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis.
- Koordinasi pengembangan hilirisasi timah dengan PT Timah.
- Pengendalian berupa Monitoring dan Evaluasi proyek penelitian tentang Sustainable Ecosystem Development of Lithium-ion Batteries for Electric Vehicles: from Design process to recyclability.
- Koordinasi pembahasan perkembangan Negosiasi tarif AS kepada Indonesia sebagai bahan untuk perundingan agar memberikan dampak signifikan dalam memperluas pasar serta penyelesaian Keppres satgas terkait.

- f. Koordinasi pembahasan pelaksanaan Deregulasi dalam rangka Peningkatan Daya Saing Nasional.
- g. Sinkronisasi kebijakan harga Gas Bumi tertentu di Bidang Industri berdasarkan surat keluhan IRGMA dan FIPBG.
- h. Koordinasi terkait Deregulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam PP 5 Tahun 2021.
- i. Koordinasi antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Asosiasi Industri Padat Karya terkait kinerja ekspor akibat adanya kebijakan tarif Trump.
- j. Koordinasi pengharmonisasian atas RPermenperin tentang Verifikasi Penelusuran Teknis Bidang Standardisasi Industri.
- k. Telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengembangan Ekosistem Industri Baterai KBLBB di Indonesia pada tanggal 13 Juni 2025, dalam rangka pemetaan kajian dan regulasi terkait ekosistem baterai EV yang disusun oleh Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Perindustrian, dan IBC serta teridentifikasi permasalahan dan kebutuhan penyusunan peta jalan komprehensif.
- l. Pelaksanaan pengesahan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 374 Tahun 2025 tentang satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru.

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Rasio PDB Industri Pengolahan ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

1. Masih bergantung pada bahan baku impor jadi adanya tekanan oleh pelemahan rupiah dan kenaikan harga global
2. Minimnya diversifikasi industri dan telatnya hilirisasi industri
3. Tingkat utilitasi kapasitas industri belum optimal terutama sektor padat karya.

Strategi dan Upaya Perbaikan

Rasio PDB Industri Pengolahan Indonesia pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 18,66 persen. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan II tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a. Mempercepat transformasi digital dalam manufaktur seperti industri 4.0
- b. Perluasan insentif fiskal untuk industri berteknologi tinggi dan padat karya
- c. Mendorong substitusi impor bahan baku dengan peningkatan kapasitas hulu dalam negeri.

1.5. Devisa Pariwisata

Latar Belakang

Devisa Pariwisata adalah indikator strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor pariwisata dalam menghasilkan devisa negara, khususnya melalui pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman) selama kunjungan mereka ke Indonesia dalam periode tertentu. Devisa pariwisata merupakan salah satu indikator strategis dalam menilai kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. Secara sederhana, devisa pariwisata menggambarkan besarnya pemasukan negara dari pengeluaran wisatawan mancanegara selama mereka berkunjung ke Indonesia. Adapun sumber utama pembentuk devisa pariwisata sebagai berikut:

1. Akomodasi

Pengeluaran wisatawan untuk penginapan adalah salah satu kontributor terbesar devisa pariwisata. Hal ini mencakup pembayaran hotel, vila,

resort, guesthouse, hingga homestay. Tingginya permintaan terhadap akomodasi berkualitas mendorong pengembangan industri perhotelan dan membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal.

2. Makanan dan Minuman (Kuliner)

Kuliner Indonesia yang kaya cita rasa turut menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara. Dari restoran berbintang hingga warung kaki lima, pengeluaran wisatawan pada sektor makanan dan minuman memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa, sekaligus mendorong ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

3. Transportasi Lokal

Setelah tiba di Indonesia, wisatawan membutuhkan transportasi untuk menjelajahi destinasi wisata. Belanja devisa pada sektor ini mencakup sewa kendaraan, tiket pesawat domestik, angkutan umum, kapal wisata, hingga jasa pemandu. Kualitas dan keterjangkauan moda transportasi mempengaruhi kenyamanan dan lama tinggal wisatawan, yang pada akhirnya berdampak pada besarnya pengeluaran mereka.

4. Belanja dan Oleh-oleh

Kegiatan berbelanja menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman wisata. Wisatawan biasanya membeli cendera mata, produk kerajinan tangan, pakaian, perhiasan, atau produk khas daerah lainnya. Pengeluaran ini menjadi ladang penghasilan bagi UMKM lokal, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi di daerah tujuan wisata.

5. Atraksi dan Rekreasi

Wisatawan juga mengeluarkan uang untuk menikmati berbagai atraksi wisata, seperti tiket masuk objek wisata, pertunjukan budaya, taman hiburan, paket wisata bahari, dan kegiatan petualangan alam. Semakin banyak pilihan atraksi berkualitas, maka semakin besar peluang devisa yang dihasilkan.

6. Jasa Lainnya

Komponen ini mencakup berbagai layanan pendukung seperti jasa tur dan travel, fotografi profesional, spa dan wellness, komunikasi, dan layanan pribadi lainnya. Walaupun porsi tidak sebesar komponen utama lainnya, jasa ini turut memperkaya pengalaman wisatawan sekaligus memberikan kontribusi tambahan terhadap devisa.

Dalam perumusannya, IKU ini terdiri dari dua komponen utama yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam periode tertentu, biasanya dihitung secara tahunan. Angka ini mencerminkan volume wisatawan yang berhasil ditarik oleh daya tarik destinasi, promosi internasional, serta kemudahan akses masuk ke Indonesia. Komponen kedua adalah rata-rata pengeluaran per wisatawan mancanegara selama kunjungan mereka. Pengeluaran ini mencakup berbagai aktivitas seperti akomodasi, konsumsi makanan dan minuman, transportasi lokal, rekreasi, belanja oleh-oleh, serta jasa lainnya. Kombinasi dari kedua komponen tersebut—jumlah wisatawan dan besarnya pengeluaran mereka—menghasilkan nilai devisa pariwisata yang digunakan sebagai indikator keberhasilan program pembangunan sektor pariwisata nasional. IKU ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja kementerian terkait, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan ekonomi nasional serta pembentukan kebijakan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.

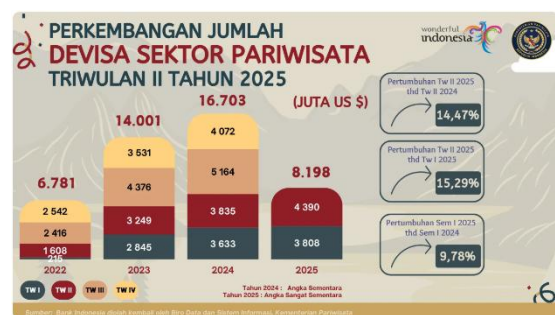
Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target Devisa Pariwisata terhadap adalah sebesar 19,00 miliar – 22,10 miliar pada tahun 2025. Hingga saat laporan kinerja disusun,

pengukuran IKU Devisa Pariwisata pada Triwulan II tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
Indikator 1.5 Devisa Pariwisata	USD	4,39 miliar	4,39 miliar	100

Pada triwulan II tahun 2025, sektor pariwisata Indonesia mencatatkan penerimaan devisa sebesar US\$4.390 juta. Angka ini mencerminkan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional, realisasi tersebut jika diakumulasi dengan penerimaan pada triwulan I 2025 maka totalnya semester I sebesar US\$8.198 juta. Terjadi peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Triwulan I 2025), yang mencapai US\$3.808,2 juta, atau setara dengan peningkatan sebesar 15,29% secara kuartalan.



Penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pasca-libur akhir tahun, serta tantangan global seperti pelemahan ekonomi negara mitra dagang dan nilai tukar

rupiah terhadap dolar AS yang turut memengaruhi daya saing pariwisata Indonesia. Selain itu, sebagian besar wisatawan masih terkonsentrasi di destinasi utama seperti Bali, yang menyumbang lebih dari 40% devisa sektor ini, sehingga ketergantungan pada satu wilayah menjadi tantangan tersendiri.

Meski demikian-4, kinerja pada awal tahun ini tetap memberikan fondasi yang cukup baik dalam rangka pencapaian target devisa pariwisata nasional tahun 2025 yang dipatok di kisaran US\$19 hingga US\$22,1 miliar. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendorong diversifikasi destinasi wisata, penguatan desa wisata, serta promosi internasional untuk menarik wisatawan mancanegara berdaya beli tinggi.

Dengan strategi tersebut dan peningkatan tren kunjungan wisatawan menjelang musim liburan pertengahan tahun, diharapkan sektor pariwisata dapat kembali mengakselerasi pertumbuhan devisa dalam kuartal-kuartal berikutnya dan mendukung kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional yang ditargetkan mencapai 4,6% pada akhir tahun 2025.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Devisa Pariwisata yang telah ditetapkan, antara lain:

- Koordinasi bersama K/L terkait dan beberapa perusahaan maskapai penerbangan (airlines) terkait peningkatan konektivitas melalui pembukaan rute dari dan menuju Bangka Belitung (Tanjung Kelayang).
- Sinkronisasi terkait alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan yang ada terkait Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas.

- c. Terlaksananya evaluasi tahun 2024 mengenai KEK Tanjung Kelayang dan Morotai, untuk menetapkan strategi tindak lanjut peningkatan konektivitas dan aksesibilitas.
- d. Koordinasi dalam upaya peningkatan status Bandara HAS Hanadjoedin menjadi Bandara Internasional yang ditetapkan dalam regulasi KepMenHub No. 26 Tahun 2025.
- e. Koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dalam penyusunan revisi regulasi Badan Otorita Borobudur, Danau Toba dan Labuan Bajo.

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target transaksi berjalan ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

1. Fluktuasi kunjungan wisatawan mancanegara
2. Masih terpusatnya destinasi utama wisata asing seperti Bali, Lombok, dan Jogja.
3. Promosi branding global terkait wisata di Indonesia masih belum terintegrasi

Strategi dan Upaya Perbaikan

Devisa Pariwisata Indonesia pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar USD4,39 miliar menjadi salah satu pendorong upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di triwulan selanjutnya. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan II tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a. Mendorong diversifikasi destinasi wisata di daerah yang memiliki potensi wisata
- b. Melakukan penguatan program masyarakat untuk mengembangkan desa wisata
- c. Menggiatkan promosi wisata di event internasional

1.6. Rasio PDB Pariwisata

Latar Belakang

Rasio PDB Pariwisata adalah indikator makroekonomi sektoral yang digunakan untuk mengukur kontribusi langsung sektor pariwisata terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu (umumnya tahunan). Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi signifikansi ekonomi pariwisata dalam sistem perekonomian nasional dan sebagai parameter keberhasilan pembangunan pariwisata berbasis output riil.

IKU ini didasarkan pada pendekatan Tourism Satellite Account (TSA), sebuah kerangka statistik internasional yang dikembangkan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) bersama lembaga-lembaga global seperti OECD dan Eurostat. Dalam TSA, hanya aktivitas ekonomi yang memiliki keterkaitan langsung dengan permintaan wisatawan yang diperhitungkan sebagai bagian dari kontribusi PDB pariwisata. Dengan demikian, IKU Rasio PDB Pariwisata tidak hanya mencerminkan jumlah wisatawan, melainkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari interaksi konsumsi wisatawan dengan industri-industri yang menyediakan barang dan jasa wisata.

Nilai Tambah Bruto Sektor Pariwisata dihitung dari output dikurangi konsumsi antara sektor-sektor yang melayani wisatawan secara langsung. Adapun komponen pariwisata meliputi subsektor seperti:

- a. Akomodasi
- b. Makanan dan minuman
- c. Transportasi
- d. Agen perjalanan dan tour operator
- e. Aktivitas budaya dan rekreasi
- f. Industri souvenir dan kerajinan terkait wisata

Perhitungan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik permintaan wisatawan (manacanegara dan domestik), sehingga indikator ini benar-benar menggambarkan kontribusi ekonomi nyata (real economic impact) dari sektor pariwisata.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target Rasio PDB Pariwisata adalah sebesar 4,5 – 4,6 pada tahun 2025. Hingga saat laporan kinerja disusun, pengukuran IKU Rasio PDB Pariwisata pada Triwulan I tahun 2025 menggunakan data yang diolah dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
Indikator 1.6 Rasio PDB Pariwisata	Persentase	1,07	1,07	100

Rasio PDB Pariwisata merupakan indikator penting yang mencerminkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. Indikator ini dihitung dari perbandingan antara Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari aktivitas pariwisata dengan total PDB nasional, dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar peran sektor pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Rasio ini mencakup seluruh nilai tambah bruto yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi terkait pariwisata, seperti jasa akomodasi, transportasi wisata, makanan dan minuman, jasa perjalanan, serta sektor budaya dan hiburan yang dikonsumsi oleh wisatawan. Oleh karena itu, rasio PDB Pariwisata tidak hanya menjadi ukuran langsung dari kinerja sektor ini, tetapi juga mencerminkan daya saing dan efektivitas kebijakan pembangunan pariwisata nasional.

Dalam konteks ekonomi Indonesia, penguatan rasio PDB Pariwisata menunjukkan keberhasilan dalam mengoptimalkan potensi destinasi wisata serta peran pariwisata sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah terus mendorong peningkatan kontribusi sektor ini melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, promosi destinasi, dan dukungan terhadap pelaku usaha pariwisata.

Dengan pemantauan rasio PDB Pariwisata secara berkala, diharapkan pengambilan kebijakan pembangunan sektor pariwisata dapat lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak luas terhadap perekonomian nasional maupun kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Rasio PDB Pariwisata yang telah ditetapkan, antara lain:

- Koordinasi dalam pertemuan dan audiensi dengan WIR Group.
- Koordinasi terkait pengembangan asuransi pariwisata dengan Insuretech dan Jasa Raharja Putera.
- Pelaksanaan rapat koordinasi terkait pengembangan pariwisata regeneratif.
- Terlaksananya beberapa kajian terkait alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan yang ada kaitannya dengan Digitalisasi Layanan Perizinan Event.

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Rasio PDB Pariwisata ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

1. Masih adanya ketergantungan terhadap musim dan hari libur nasional
2. Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas
3. Belum optimalnya investasi pariwisata di daerah-daerah

Strategi dan Upaya Perbaikan

Rasio PDB Pariwisata Indonesia pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 1,07 persen menjadi salah satu pendorong upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di triwulan selanjutnya. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan I tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a. Memperkuat dan memperluas konektivitas serta aksesibilitas ke tempat wisata yang potensial
- b. Digitalisasi dan pemasaran wisata berbasis teknologi masakini
- c. Penguatan investasi dan ekosistem industri pariwisata tanah air

1.7. Indeks Ketahanan Energi

Latar Belakang

Indeks Ketahanan Energi adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu negara atau wilayah dalam menjamin pasokan energi yang andal, terjangkau, berkelanjutan, dan merata, guna mendukung pembangunan ekonomi, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

Indeks ini merepresentasikan kinerja sistem energi dari berbagai aspek strategis, seperti ketersediaan energi (availability), aksesibilitas dan keterjangkauan (accessibility and affordability), ketergantungan energi terhadap luar negeri (security), efisiensi dan keberlanjutan lingkungan (sustainability), serta diversifikasi sumber energi.

1. Availability (Ketersediaan): menilai sejauh mana cadangan dan pasokan energi (primer dan final) cukup untuk kebutuhan nasional.
2. Accessibility: mengukur keterjangkauan infrastruktur dan distribusi energi oleh masyarakat dan industri.
3. Affordability (Keterjangkauan Harga): menilai kemampuan masyarakat untuk membeli energi dengan harga yang wajar.
4. Security (Ketahanan Pasokan): mengukur ketergantungan terhadap impor energi dan kemampuan menghadapi gangguan eksternal.
5. Sustainability & Efficiency: mengukur proporsi energi baru terbarukan, efisiensi penggunaan energi, dan dampak lingkungan dari sistem energi.
6. Diversifikasi Energi: menilai tingkat variasi sumber energi nasional untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis sumber.

Indeks Ketahanan Energi bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor seperti berikut: memberikan alat ukur yang objektif dan komprehensif untuk mengevaluasi ketahanan energi nasional dari sisi teknis, sosial ekonomi, dan lingkungan; mendukung perumusan kebijakan energi yang holistik, terintegrasi, dan berorientasi masa depan, termasuk dalam perencanaan transisi energi nasional; memfasilitasi monitoring dan evaluasi program serta investasi energi agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna; mengantisipasi risiko dan gangguan pasokan energi, serta meningkatkan kapasitas respons dan mitigasi melalui diversifikasi dan efisiensi; memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial nasional dengan sistem energi yang handal, adil, dan berkelanjutan; mendorong investasi dan inovasi di sektor energi, dengan memberikan kepastian dan gambaran risiko kepada pelaku usaha.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target Indeks Ketahanan Energi adalah sebesar 6,77 pada tahun 2025. Hingga saat laporan kinerja disusun, pengukuran IKU Indeks Ketahanan Energi pada Triwulan I tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Dewan Energi Nasional.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
Indikator 1.7 Indeks Ketahanan Energi	Indeks	6,77	6,64*	98,07

*Angka sementara

Pada Triwulan I 2025, Indonesia terus meneruskan upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Meskipun skor resmi Indeks Ketahanan Energi dari Dewan Energi Nasional (DEN) untuk periode ini belum dirilis, tren positif terlihat dari pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 99,83%, yang menggambarkan perbaikan akses energi merata di seluruh wilayah, meskipun masih terdapat celah layanan di lebih dari 5.700 desa dan 1,3 juta rumah tangga.

Dewan Energi Nasional (DEN) mencatat indeks ketahanan energi Indonesia saat ini berada dalam kategori tahan (skor 6 hingga 7,99). Hal ini dapat dilihat dari indeks ketahanan energi RI dengan capaian skor 6,64. Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mencapai indeks ketahanan energi yang ideal dengan skor 7 bahkan 10. Dalam mengukur indeks ketahanan energi, para pakar energi menggunakan 4 aspek yakni, availability, accessibility, affordability dan acceptability. Terkait affordability, Indonesia masih memberikan harga subsidi baik batubara untuk PT PLN (Persero), elpiji, serta bensin masih pemerintah yang menetapkan harga.



Pengukuran ketahanan energi sendiri selain menggunakan aspek 4A (availability, affordability, accessibility, dan acceptability) tadi juga menggunakan metode pembobotan menggunakan AHP (analisa hierarchy process).

Aspek availability adalah ketersediaan sumber energi dan energi baik dari domestik maupun luar negeri. Selanjutnya, aspek affordability yaitu keterjangkauan biaya investasi energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi, hingga keterjangkauan konsumen terhadap harga energi. Kemudian aspek accessibility adalah kemampuan untuk mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografik dan geopolitik. Sedangkan aspek acceptability adalah penggunaan energi yang peduli lingkungan (darat, laut dan udara) termasuk penerimaan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan pencapaian infrastruktur dan kebijakan energi hingga akhir Q1 2025, diyakini bahwa ketahanan energi nasional

tetap berada pada kategori Tahan, dengan kemungkinan peningkatan lebih lanjut menuju kategori ideal sesuai target DEN.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Indeks Ketahanan Energi yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Koordinasi TKDN PLTS
- b. Koordinasi terkait harmonisasi RPermen tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi yang diinisiasi Kementerian Hukum.
- c. Koordinasi terkait insentif fiskal dan non fiskal dalam pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar nabatin; pemabgian tugas antara Kemenko Ekon dan Kemenko Pangan; usulan penambahan pengaturan DMO terkait molases.
- d. Telah diluncurkan Front-End Engineering Design (FEED) proyek onshore LNG Masela di Maluku.
- e. Koordinasi terkait pengusulan perlunya Roadmap dan kajian teknis terkait peningkatan impor untuk komoditas migas.
- f. Koordinasi untuk menyepakati kebijakan terkait insentif fiskal dan non fiskal dalam pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar nabati.
- g. Koordinasi pembahasan mekanisme Floating Storage (FS) Balikpapan 2025.
- h. Pengendalian untuk monitoring dan evaluasi program insentif Biodiesel.
- i. Koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait perubahan Perpres Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan No. 4/2016.

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Indeks Ketahanan Energi ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

1. Masih tingginya ketergantungan terhadap energi fosil
2. Realisasi energi baru terbarukan yang masih rendah
3. Infrastruktur energi belum merata dan rentan

Strategi dan Upaya Perbaikan

Indeks Ketahanan Energi Indonesia pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 6,64 menjadi salah satu pendorong upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di triwulan selanjutnya. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan I tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemanfaatan EBT dalam bauran energi
- b. Mempercepat pemanfaatan kendaraan listrik secara luas
- c. Meningkatkan kapasitas kilang minyak dan produksi minyak bumi.

1.8. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global

Latar Belakang

IKU Indeks Daya Saing Digital adalah indikator strategis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kapabilitas digital suatu negara—termasuk Indonesia—dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi di era transformasi digital global. Diukur oleh lembaga internasional seperti IMD (International Institute for Management Development) dan WEF (World Economic Forum), indeks ini merefleksikan posisi Indonesia dibandingkan negara lain dalam hal digitalisasi ekonomi, teknologi, SDM digital, dan kesiapan infrastruktur.

Indeks ini mengintegrasikan berbagai aspek penting, seperti infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kualitas sumber daya manusia digital, ekosistem inovasi digital, kebijakan dan regulasi yang mendukung digitalisasi, serta tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dan bisnis. Melalui pengukuran ini, Indonesia dapat mengetahui posisi relatifnya dibandingkan negara lain di dunia dalam hal perkembangan dan daya saing digital. Indeks ini menjadi alat penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi, kebijakan, serta program yang bertujuan meningkatkan ekosistem digital nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, dan mempercepat inklusi digital secara berkelanjutan.

Dengan kata lain, Indeks Daya Saing Digital Indonesia di tingkat global adalah parameter strategis yang menilai efektivitas dan kemajuan Indonesia dalam membangun ekosistem digital yang kompetitif dan adaptif terhadap dinamika teknologi global.

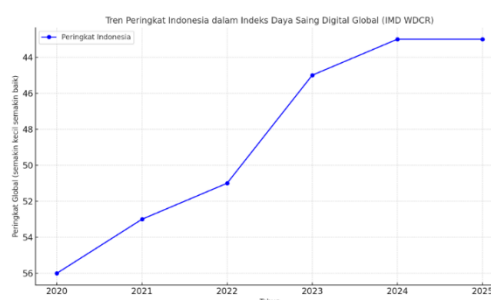
Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global adalah sebesar 43 pada tahun 2025. Hingga saat laporan kinerja disusun, pengukuran IKU Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global pada Triwulan I tahun 2025 yang dikeluarkan oleh International Institute for Management Development (IMD).

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
Indikator 1.8 Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Indeks	43	43*	100

*angka tahun 2024

Pada triwulan I tahun 2025, Indonesia menunjukkan kinerja yang positif dalam upaya memperkuat daya saing digital di tingkat global. Berdasarkan rilis terakhir dari IMD World Digital Competitiveness Ranking, posisi Indonesia mengalami perbaikan dengan berada di



peringkat ke-43 dari 67 negara, naik dari posisi ke-45 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan arah kebijakan digital nasional yang semakin terfokus dan partisipasi aktif sektor swasta dalam

mendorong transformasi ekonomi berbasis teknologi.

Perbaikan kinerja tersebut terutama didorong oleh keunggulan Indonesia dalam beberapa aspek strategis. Indonesia menempati peringkat ke-2 dunia dalam pemanfaatan big data dan digitalisasi layanan keuangan, peringkat ke-3 dalam investasi sektor telekomunikasi, serta peringkat ke-5 dalam aktivitas pendanaan inovasi melalui venture capital. Sektor keuangan digital, infrastruktur komunikasi, serta adopsi teknologi oleh pelaku usaha menjadi pendorong utama penguatan daya saing digital nasional.

Secara regional, Indonesia berada di peringkat ke-4 di Asia Tenggara, setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand, namun berada di atas

Filipina. Dengan skor keseluruhan sebesar 61,36, capaian ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang konsisten, masih dibutuhkan terobosan kebijakan yang lebih kuat untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Sinkronisasi atas masukan Idea terhadap RPKM PMSE.
- b. Koordinasi pembahasan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB.
- c. Koordinasi dalam pelaksanaan program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Rakor dilakukan untuk wilayah barat di Bandung dan Wilayah Timur di Makassar.
- d. Koordinasi Satgas P2DD terkait perubahan nomenklatur pada K/L anggota Satgas P2DD serta dalam rangka mendukung penajaman tugas dan fungsi Satgas P2DD dan TP2DD.

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

1. Masih belum memadainya akses dan kualitas infrastruktur digital
2. Masih rendahnya kecepatan internet pita lebar disertai dengan rendahnya penetrasi broadband.
3. Masih rendahnya kualitas pendidikan teknologi dan pelatihan SDM digital diikuti dengan minimnya kontribusi riset terutama untuk kecerdasan buatan (AI)

Strategi dan Upaya Perbaikan

Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global pada Triwulan I Tahun 2025 berada pada peringkat 43 menjadi salah satu pendorong upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di triwulan selanjutnya. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan I tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target tersebut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akselerasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur digital
- b. Perluasan akses internet berkualitas dan cepat
- c. Meningkatkan kompetensi talenta digital melalui program pendidikan yang berfokus pada kecerdasan buatan atau AI

2

Sasaran Strategis 2: *Terkendalinya Tingkat Inflasi Nasional sesuai dengan Fundamental Ekonomi*

Pencapaian Sasaran Strategis 2: **Terkendalinya Tingkat Inflasi Nasional sesuai dengan Fundamental Ekonomi** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Tingkat Inflasi

2.1 Tingkat Inflasi

Latar Belakang

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat terjadi karena adanya tekanan dari sisi supply, sisi demand, dan ekspektasi inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa

inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah pendapatan riil masyarakat akan terus turun dan akhirnya menjadikan masyarakat miskin semakin rentan.

Terjaganya inflasi di sekitar sasaran adalah salah satu indikator utama yang mengukur pengendalian stabilitas inflasi pada rentang angka yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan dan/atau dokumen perencanaan. Dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil serta sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah. Melalui dasar tersebut, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) yang ditetapkan atas dasar Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Penetapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP ini juga selaras dengan amanat Perpres No. 37 tahun 2020 dimana Kemenko Perekonomian memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan serta penyelesaian masalah dan isu di bidang perekonomian.

Dengan ditetapkannya Menko Perekonomian sebagai ketua TPIP, maka tugas yang dijalankan terkait terbagunya inflasi di kisaran antara lain:

- A. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah
- B. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- C. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator tingkat inflasi merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian serta perannya sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Dalam rangka menjaga target inflasi nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi laju inflasi, sebagai berikut:

- (1) Tingkat inflasi bahan makanan yang terjaga dalam rentang target
- (2) Cadangan beras pemerintah
- (3) Implementasi strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah untuk mendukung penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

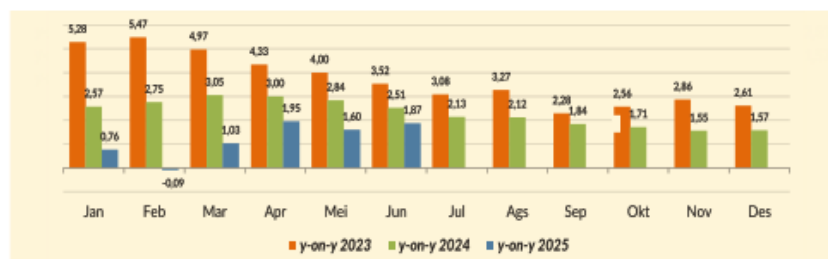
Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar $2,5 \pm 1$, data kinerja terkait inflasi dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik secara bulanan. Untuk mengukur capaian kinerja triwulanan adalah dengan membandingkan inflasi secara *year-on-year* yang baru dapat diperoleh datanya pada setiap bulan ketika bulan tersebut sudah lewat. adapun perhitungan capaian kinerja ini dengan membandingkan inflasi pada bulan Juni 2025 dengan Juni 2024 dengan perhitungan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 2.1. Tingkat Inflasi	Persentase	2,5 ± 1	1,87	100%

Inflasi Juni 2025 tercatat 1,87% (yoy) berada dalam kondisi stabil sejak Maret 2025. Realisasi tersebut didukung dan pergerakan komponen inflasi inti (*Core*), komponen *Administered Price* (AP) dan *Volatile Food* (VF) yang mengalami inflasi. Inflasi *y-on-y* tertinggi terjadi di Provinsi Papua Selatan sebesar 3,00 persen dan terendah terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,45 persen. Deflasi provinsi *y-on-y* terdalam terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 0,67 persen dan terendah terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 0,10 persen. Sedangkan Inflasi tertinggi Kabupaten/Kota *y-on-y* tertinggi terjadi di Luwuk sebesar 4,00 persen dan terendah terjadi di Kota Tanjung Pinang sebesar 0,07 persen. Deflasi Kabupaten/Kota *y-on-y* terdalam terjadi di Kabupaten Mukomuko sebesar 1,34 persen dan terendah terjadi di Kabupaten Karimun sebesar 0,15 persen.

Grafik.1 Perkembangan Inflasi 2023 - 2025

Tingkat Inflasi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Month-to-Month (M-to-M)	0,14	-0,08	0,19
Year-to-Date (Y-to-D)	1,24	1,07	1,38
Year-on-Year (Y-on-Y)	3,52	2,51	1,87



Inflasi bulanan selama tahun 2025 ini dari Januari hingga Juni, Inflasi tercatat sebesar 0,19 (mtm), inflasi yang cukup tinggi meskipun dalam rentang secara bulanan pada Juni 2025 dipengaruhi oleh adanya pergerakan secara bulanan yang masih terkendali dari inflasi inti dimana inflasi inti tercatat sebesar 0,07%, tidak jauh berbeda dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,08% (mtm), terutama disumbang oleh peningkatan harga komoditas emas global. Kelompok *Administered Price* (AP) dan kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 0,09% dan 0,77% (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,02% untuk *Administered Price* (AP) dan untuk volatile food lebih tinggi dari bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 2,48% (mtm). Inflasi kelompok *Administered Price* (AP) disumbang terutama oleh komoditas tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, dan sigaret kretek masin (SKM). Inflasi kelompok *volatile food* disumbang terutama oleh komoditas beras, cabai rawit, dan bawang merah.

Tabel.1 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (%)

Komponen	IHK Juni 2024	IHK Desember 2024	IHK Juni 2025	Tingkat Inflasi M-to-M Juni 2025 (%)	Tingkat Inflasi Y-to-D Juni 2025 (%)	Tingkat Inflasi Y-on-Y Juni 2025 (%)	Andil Inflasi M-to-M Juni 2025 (%)	Andil Inflasi Y-on-Y Juni 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum	106,28	106,80	108,27	0,19	1,38	1,87	0,19	1,87
Inti	104,19	105,35	106,66	0,07	1,24	2,37	0,04	1,51
Harga Diatur Pemerintah	108,58	108,80	110,03	0,09	1,13	1,34	0,02	0,26
Bergejolak	112,12	110,39	112,76	0,77	2,15	0,57	0,13	0,10
Energi	107,44	106,95	107,16	-0,12	0,20	-0,26	-0,01	-0,03
Bahan Makanan	110,20	109,29	111,46	0,60	1,99	1,14	0,12	0,24

1. Perkembangan inflasi inti pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,07% (mtm), relatif stabil dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,08% (mtm). Realisasi inflasi inti tersebut disumbang terutama oleh beberapa komoditas emas global. Secara tahunan, inflasi inti Juni 2025 tercatat sebesar 2,37%, menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,40% (yoy).
2. Pada Juni 2025, komponen VF mengalami inflasi sebesar 0,77% (mtm), lebih tinggi dari deflasi bulan sebelumnya sebesar 2,48% (mtm). Inflasi kelompok *volatile food* disumbang terutama oleh komoditas beras, cabai rawit, dan bawang merah seiring dengan penurunan pasokan yang dipengaruhi oleh berakhirnya masa panen, serta gangguan produksi dan distribusi di beberapa wilayah. Secara tahunan, kelompok *volatile food* mengalami inflasi sebesar 0,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan deflasi bulan sebelumnya sebesar 1,17% (yoy). Ke depan, inflasi *volatile food* diperkirakan tetap akan terkendali didukung sinergi pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia, TPIP dan TPID melalui GNPIP di berbagai daerah.
3. Inflasi komponen *Administered Prices* (AP) pada Juni 2025 mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,02% (mtm). Inflasi kelompok *administered prices* disumbang terutama oleh komoditas tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, dan sigaret kretek mesin (SKM) seiring dengan peningkatan mobilitas pada periode libur sekolah, penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG di beberapa daerah. Secara tahunan, inflasi kelompok *administered prices* tercatat sebesar 1,34% (yoy), menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,36% (yoy).

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Tingkat Inflasi yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Pengendalian dalam bentuk telah dilaksanakannya laporan Tingkat Inflasi kepada Presiden Republik Indonesia.
- b. Koordinasi dengan pelaksanaan Rakor TPIP-TPID Wilayah Bali-Nusa Tenggara (BaliNusra).

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Inflasi ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

1. Adanya lonjakan harga pangan akibat penurunan pasokan yang disebabkan akhir musim panen serta gangguan distribusi
2. Adanya penyesuaian harga terhadap barang yang diatur oleh pemerintah
3. Harga komoditas emas global yang mengalami kenaikan

Strategi dan Upaya Perbaikan

Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan II tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target Tingkat Inflasi tersebut sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi TPIP – TPID melalui High Level Meeting dan Rakornas dengan fokus pada pengendalian harga pangan, kelancaran distribusi, dan mengurangi disparitas harga antarwilayah.
- b. Stimulus fiskal seperti subsidi transportasi dan bantuan langsung untuk menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat
- c. Kebijakan moneter yang responsif dan terukur

3

Sasaran Strategis 3: *Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan.*

Pencapaian Sasaran Strategis 3: **Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

3.1 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Latar Belakang

Lapangan kerja adalah kesempatan atau tempat bagi seseorang untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, baik di sektor formal maupun informal, sesuai dengan keahlian, pendidikan, atau keterampilan yang dimilikinya. Sementara itu, Lapangan kerja formal adalah jenis pekerjaan yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan umumnya memiliki perlindungan hukum serta hak-hak tenaga kerja yang jelas. Beberapa ciri-ciri lapangan kerja formal: Status hukum jelas; perjanjian kerja tertulis; upah minimum dan jaminan sosial; jam kerja dan cuti diatur; pajak dan iuran dibayarkan.

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal merupakan persentase peningkatan lapangan kerja formal dibandingkan dengan total peningkatan lapangan kerja (formal dan informal) dalam suatu periode waktu tertentu. Proporsi ini tidak hanya mengukur kuantitas lapangan kerja yang diciptakan, tetapi juga kualitasnya. Penyediaan lapangan kerja yang baik tidak hanya dilihat dari seberapa banyak pekerjaan yang tersedia, tetapi juga seberapa banyak dari pekerjaan tersebut yang memenuhi standar formal. Proporsi lapangan kerja formal yang tinggi dapat menciptakan lingkaran positif. Pekerja formal memiliki daya beli yang lebih tinggi, yang mendorong permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Proporsi Lapangan Kerja Formal merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Proporsi Lapangan Kerja Formal yang telah ditetapkan,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Proporsi Lapangan Kerja Formal.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target kinerja Proporsi penciptaan lapangan kerja formal ini pada tahun 2025 sebesar 35 persen, data kinerja terkait inflasi dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik secara semesteran. Adapun perhitungan capaian kinerja ini dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik yang telah diolah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
Indikator 3.1 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persentase	35	40,8	116

Pada Triwulan I 2025, proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Indonesia menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi pekerja formal terhadap total penduduk bekerja mencapai 40,8%, mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 40,3%.



Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam struktur ketenagakerjaan, di mana lebih banyak penduduk bekerja yang terserap ke sektor formal seperti industri pengolahan, jasa keuangan, dan teknologi informasi. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam mendorong investasi, penyederhanaan regulasi perizinan usaha, serta program pelatihan kerja yang terfokus pada kebutuhan dunia industri.

Meskipun demikian, tantangan masih cukup besar. Proporsi pekerja di sektor informal masih mendominasi, khususnya di sektor perdagangan informal, pertanian, dan jasa nonformal. Situasi ini menunjukkan bahwa transformasi struktural menuju perekonomian berbasis sektor formal masih membutuhkan waktu dan dukungan kebijakan yang konsisten.

Secara keseluruhan, peningkatan proporsi lapangan kerja formal ini menjadi indikator penting dalam upaya memperkuat kualitas tenaga kerja nasional. Ke depan, akselerasi penciptaan lapangan kerja formal akan menjadi kunci untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja, produktivitas nasional, dan daya saing ekonomi Indonesia secara menyeluruh.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk

mencapai target Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Koordinasi Kemenko Perekonomian dengan Kemenko PMK dan Kementerian PPPA terkait Pokja Care Economy.
- b. Pengendalian dalam bentuk terbitnya beberapa Peraturan seperti: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan; PMK Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

1. Masih tingginya sektor Informal terhadap struktur ekonomi
2. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja pada sektor formal
3. Tingginya kesenjangan keterampilan dan kualifikasi SDM antara sektor formal dan informal

Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan I tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal tersebut sebagai berikut: periode selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- a. Mendorong pertumbuhan sektor penyerap tenaga kerja formal seperti pada industri manufaktur, konstruksi, dan jasa modern
- b. Peningkatan kualitas dan keseuaian keterampilan SDM
- c. Peningkatan peran dunia usaha dan kemitraan

3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Latar Belakang

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dihitung sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau mencari kerja. Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja dalam suatu wilayah/negara pada periode tertentu. Tingkat Pengangguran Terbuka mengukur seberapa besar persentase angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi menunjukkan adanya banyak orang yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan faktor penting yang mempengaruhi penyediaan lapangan kerja suatu negara. Ketika

pengangguran tidak bisa teratasi dengan baik tentunya lapangan kerja akan semakin minim karena adanya ketidakseimbangan antara kedua faktor tersebut. Tingginya tingkat pengangguran tentunya pasti akan mempengaruhi lapangan kerja dan menjadi pengganggu bagi tercapainya tujuan negara.

Berdasarkan dengan hal diatas, maka pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan variabel makro ekonomi yang bersifat ultimate outcome serta merupakan kinerja yang dihasilkan dari proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka menjaga target Tingkat Pengangguran Terbuka yang telah ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap indikator-indikator yang secara signifikan mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka ini pada tahun 2025 sebesar 4,5 - 5 persen, data kinerja terkait Tingkat Pengangguran Terbuka dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Sakernas. Adapun perhitungan capaian kinerja ini dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
Indikator 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5 - 5	4,76	100

Pada triwulan I tahun 2025 (berdasarkan Sakernas Februari 2025), tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia tercatat sebesar 4,76% dari total angkatan kerja nasional. Angka ini menunjukkan penurunan tipis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Februari 2024) yang sebesar 4,82%, mencerminkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja secara nasional.



Meskipun secara persentase terjadi penurunan, jumlah penganggur secara absolut justru mengalami sedikit peningkatan menjadi sekitar 7,28 juta orang, atau bertambah sekitar 83 ribu orang (1,11%) dibandingkan tahun

sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja yang belum sepenuhnya diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja baru, terutama di sektor formal.

Penurunan TPT ini sekaligus menjadi indikasi bahwa pemulihan ekonomi nasional mulai memberi dampak pada dunia kerja, meskipun masih menghadapi tantangan struktural dalam hal penciptaan kerja berkualitas, terutama bagi angkatan kerja muda dan lulusan pendidikan menengah ke atas.

Ke depan, pemerintah diharapkan dapat terus memperkuat sektor-sektor strategis penyerap tenaga kerja, mendorong investasi, serta meningkatkan kualitas dan relevansi keterampilan tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja formal yang semakin dinamis.

Berdasarkan capaian kinerja diatas beberapa kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target Tingkat Pengangguran Terbuka yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Terbentuknya Tim Transisi Pengalihan Program Kartu Prakerja dari Kemenko Perekonomian kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendukung penyusunan revisi RPerpres Program Kartu Prakerja.
- b. Sinkronisasi terkait kebijakan paket stimulus ekonomi kuartal II-2025 dalam rangka pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Kendala Pencapaian Target

Tantangan pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

1. Adanya Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja
2. Adanya ketidaksesuaian kualifikasi tenaga kerja dengan lapangan kerja

Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan pada triwulan I tahun 2025 dalam mengupayakan pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka tersebut sebagai berikut: periode selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- a. Mendorong peningkatan kualifikasi tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia melalui Balai Latihan Kerja
- b. Mempercepat hilirisasi industri dan fokus pada pengembangan program padat karya
- c. Reformasi regulasi ketenagakerjaan dan iklim investasi

4

Sasaran Strategis 4: *Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas*

Pencapaian Sasaran Strategis 4 : ***Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas*** ditunjukkan dan dihitung berdasarkan capaian 1 indikator kinerja yakni Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian

4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian

Latar Belakang

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dalam pelaksanaannya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertugas memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi. Menteri yang bertanggung jawab atas Indeks Efektivitas

Sinkronisasi Koordinasi Pengendalian adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah:

1. Kebijakan terkait Realisasi Belanja Modal BUMN
2. Kebijakan terkait Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
3. Kebijakan terkait Penyelesaian Penugasan Pemerintah
4. Kebijakan terkait Tingkat Inflasi
5. Kebijakan terkait Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital
6. Kebijakan terkait Kerja Sama Ekonomi Bilateral
7. Kebijakan terkait Kerja Sama Ekonomi Regional
8. Kebijakan terkait Kerja Sama Ekonomi Multilateral
9. Kebijakan terkait Kerja Sama Investasi dan Hilirisasi
10. Kebijakan terkait Ekonomi Makro dan Fiskal
11. Kebijakan terkait Digital Economy Framework Agreement
12. Kebijakan terkait Program Belanja Masyarakat
13. Kebijakan terkait Pengendalian Impor
14. Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara, dan Rel
15. Kebijakan terkait Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi
16. Kebijakan terkait Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi
17. Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya
18. Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam Negeri
19. Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik
20. Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik
21. Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional
22. Kebijakan terkait Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan
23. Kebijakan terkait Pengembangan Biofuel
24. Kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)
25. Kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS
26. Kebijakan terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara
27. Kebijakan terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis
28. Kebijakan terkait Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka
29. Kebijakan terkait Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil
30. Kebijakan terkait Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
31. Kebijakan terkait Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Program Strategis
32. Kebijakan terkait Pengembangan Pariwisata

Adapun Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator internal business yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan

pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tahapan 1. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan terkait kebijakan perekonomian dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun kedepan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:

1. Dokumen Identifikasi dan Penetapan ruang lingkup yang diselesaikan
2. Kajian dalam bentuk Policy Paper, Policy Brief
3. Telaah staf tentang urgensi penanganan isu

Tahapan 2. Pada tahapan ini dilakukan penyusunan alternatif rekomendasi yang berisikan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:

1. Kajian dalam bentuk Policy Paper, Policy brief
2. Telaah staf tentang kebijakan yang diambil

Tahapan 3. Pada Tahapan ini dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:

1. Bukti penyelenggaraan rapat koordinasi berupa Notula, surat deputi
2. Rancangan kebijakan seperti: RPP, RPerpres, RPermenko, RKepmenko dan RPermen

Tahapan 4. Pada tahapan ini evaluasi dan monitoring kebijakan dilakukan terhadap rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan dalam proses sinkronisasi dan koordinasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi kebijakan dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini:

1. Laporan monitoring dan evaluasi kebijakan
2. Laporan hasil evaluasi kebijakan
1. Dokumen/kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian adalah sebesar 2 dari 4. Indeks ini merupakan hasil perhitungan yang didapat dengan setelah melalui formulasi yang menghimpun nilai dari seluruh Deputi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hingga akhir triwulan II Tahun 2025 dapat dilakukan perhitungan dengan formulasi sehingga didapat nilai Indeks 2:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Indeks	2 dari 4	2	100

Nilai diatas bersifat self assesment yang didapat berdasarkan dengan dokumen yang dihasilkan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Keberhasilan indikator Efektivitas Sinkronisasi, koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian merupakan cerminan keberhasilan seluruh Deputi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengawal isu strategis terkait perekonomian. Berikut merupakan kegiatan terkait efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, antara lain:

1. Koordinasi rekomendasi kebijakan utilisasi belanja modal BUMN 2025
2. Koordinasi rekomendasi kebijakan penyaluran KUR
3. Koordinasi alternatif rekomendasi kebijakan penyelesaian penugasan BUMN
4. Koordinasi penyelesaian kesepakatan PTA/FTA/CEPA maupun kerjasama ekonomi internasional
5. Koordinasi pada forum kerja sama ekonomi internasional yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
6. Koordinasi Implementasi kerja sama ekonomi internasional di bawah pengendalian Kemenko Perekonomian
7. Koordinasi high level meeting rekomendasi kebijakan terkait kinerja bongkar muat peti kemas untuk kegiatan ekspor-impor
8. Koordinasi high level meeting rekomendasi kebijakan terkait standarisasi dan pengawasan perdagangan
9. Koordinasi dan monitoring high level meeting kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi
10. Koordinasi kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi
11. Koordinasi kebijakan pengembangan mineral kritis dan mineral strategis
12. Koordinasi rekomendasi kebijakan terkait pembangkitan tenaga listrik
13. Koordinasi kebijakan pengembangan transisi energi berkeadilan/Just Energi Transition Partnership (JETP)
14. Koordinasi kebijakan pengembangan hilirisasi industri mineral kritis
15. Koordinasi rekomendasi kebijakan peningkatan nilai tambah bruto industri pengolahan
16. Koordinasi penyusunan alternatif rekomendasi pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja
17. Koordinasi alternatif rekomendasi kawasan strategis ekonomi prioritas yang berdaya saing.

Kendala dan Upaya Perbaikan

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam capaian indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat kesulitan dalam mengumpulkan para Stakeholder untuk berdiskusi langsung
- b. Masih belum terdapatnya kata sepakat dalam beberapa kebijakan untuk menyelesaikan isu

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- a. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait penyelesaian isu strategis..

5

Sasaran Strategis 5: *Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas*

Pencapaian Sasaran Strategis 5: ***Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas*** ditunjukkan dan dihitung berdasarkan capaian 1 indikator kinerja yakni Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian

5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait yang berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun instansi lain yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian tahun 2025 adalah 3 dari 4 (Baik):

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	Indeks	3 dari 4	3,53	117,67 %

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melakukan survey pelayanan ke kementerian/lembaga atau stakeholder terkait yang berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun instansi lain yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Kendala dan Upaya Perbaikan

Beberapa hal yang menghambat capaian persentase keberhasilan indeks kepuasan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat kendala komunikasi dengan K/L lain terkait dengan koordinasi dalam perumusan kebijakan-kebijakan terkait dengan perekonomian

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan ini agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Perlunya meningkatkan intensifitas koordinasi dalam perumusan kebijakan dengan K/L terkait.

6

Sasaran Strategis 6: *Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas*

Pencapaian Sasaran Strategis 6: ***Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas*** ditunjukkan dan dihitung berdasarkan capaian 1 indikator kinerja yakni Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik

6.1 Nilai Reformasi

Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kemenko Perekonomian dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, melalui penerapan prinsip-prinsip good governance, penguatan sistem manajemen, serta dukungan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang profesional dan integratif, sehingga mampu mendorong koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ekonomi nasional secara optimal. Sasaran strategis ini mencerminkan komitmen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) untuk menjalankan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian nasional secara efisien, akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap dinamika global maupun nasional. Tata kelola yang berkualitas berarti bahwa seluruh proses manajemen internal di Kemenko Perekonomian, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan, dilaksanakan dengan:

1. Efektivitas kelembagaan, yaitu fungsi koordinasi antar kementerian/lembaga berjalan optimal.
2. Akuntabilitas kinerja, didasarkan pada indikator yang terukur dan hasil yang nyata.
3. Transparansi dan integritas, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Adaptabilitas organisasi, dalam merespons perubahan lingkungan strategis ekonomi nasional dan global, termasuk disrupsi teknologi, krisis ekonomi, dan tantangan pembangunan berkelanjutan.

Reformasi Birokrasi merupakan proses perubahan dan pembaruan yang dilakukan dalam sistem dan struktur pemerintahan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas birokrasi. Reformasi birokrasi berupaya menyederhanakan proses bisnis dan menghilangkan hambatan birokrasi yang menghambat kinerja pemerintahan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani.

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah (pusat maupun daerah) telah berhasil menerapkan prinsip dan program reformasi birokrasi. Indeks ini menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi terdiri dari Komponen RB General (60%) dan Komponen RB Tematik (40%), penilaian ini didasarkan kepada pedoman terbaru dari Kementerian PANRB (Permen PANRB No. 9 Tahun 2023 dan Kepmen PANRB No. 182 Tahun 2024). Indeks RB dikategorikan dalam nilai sekaligus predikat tertentu.

- Nilai >90 – 100 Kategori AA memiliki predikat Istimewa
- Nilai >80 – 90 Kategori A memiliki predikat Sangat Baik
- Nilai >70 – 80 Kategori BB memiliki predikat Baik
- Nilai >60 – 70 Kategori B memiliki predikat Cukup Baik
- Nilai >50 – 60 Kategori CC memiliki predikat Cukup
- Nilai >30 – 50 Kategori C memiliki predikat Buruk
- Nilai >0 – 30 Kategori D memiliki predikat Sangat Buruk

Penilaian Indeks Refromasi Birokrasi dilakukan oleh evaluator yang berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setiap tahunnya.

Hasil Pengukuran dan Capaian Kinerja

Target kinerja Nilai Refromasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025 adalah 90,77. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan hingga TW II 2025, dengan ringkasan:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	% Kinerja
IKU 6.1. <i>Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</i>	Nilai	90,77	90,77**	100** %

**hasil realisasi dan kinerja TW I berdasarkan pengukuran activity

Pada tanggal 31 July 2025, Kementerian PAN-RB telah memberikan SE No. 6 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025. SE ini disusun untuk menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran RB nasional. Dengan demikian, pelaksanaan RB dapat berjalan secara lebih terintegrasi, terarah dan terukur dalam peningkatan kualitas tata kelola.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam dokumen Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029. Komitmen ini menunjukkan bahwa pelaksanaan RB tidak hanya menjadi agenda internal pemerintah, tetapi juga bagian integral dari visi reformasi birokrasi nasional untuk mewujudkan birokrasi kompetitif berkelas dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Kemenko Perekonomian melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian antar lintas Kementerian/Lembaga melalui peningkatan

efektifitas program, sinergisitas lintas instansi dan penguatan pemberdayaan. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain :

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024 yang disampaikan oleh Kementerian PANRB pada tanggal 26 Februari 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh nilai 88,58 atau mengalami kenaikan 3,53 poin dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini terutama didorong oleh capaian RB General yang naik sebesar 4,47 poin, meskipun pada aspek RB Tematik mengalami penurunan sebesar 0,94 poin.

Secara historis, tren nilai RB Kemenko Perekonomian menunjukkan peningkatan konsisten, dari 78,63 (2021), 77,95 (2022), 85,05 (2023) hingga 88,58 (2024). Hasil ini mencerminkan perbaikan kinerja kelembagaan, penguatan sistem kerja birokrasi, serta optimalisasi implementasi program prioritas Reformasi Birokrasi

Berdasarkan rekapitulasi indikator RB General, Proyeksi nilai RB General tahun 2025 adalah 84,01. Beberapa Indikator Reformasi Birokrasi General yang telah menunjukkan capaian optimal antara lain :

- Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General (100%)
- Persentase Penyederhaan Struktur Organisasi (100%)
- Nilai SAKIP 75 (75 dengan bobot penuh 3,00)
- Opni BPK WTP (5 poin)
- Capaian IKU (100%)
- Capaian Prioritas Nasional (100%)

Namun demikian, terdapat indikator yang masih rendah dan perlu perhatian lebih, seperti :

- Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (0,5 dari 3)
- Tindak lanjut Rekomendasi BPK (63,76%)
- Indeks BerAKHLAK (82,67, masih dibawah target 85)
- Survey Penilaian Integritas (81,81 dari target 82)
- Indeks Tata Kelola Pengadaan (75,76 dari target 85)

Berdasarkan rekapitulasi indikator RB Tematik, proyeksi nilai RB Tematik tahun 2025 adalah 6,76. Beberapa indikator Reformasi Birokrasi Tematik yang telah menunjukkan capaian optimal. Kemenko Perekonomian melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian antar lintas Kementerian/Lembaga melalui peningkatan efektifitas program, sinergisitas lintas instansi dan penguatan pemberdayaan. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain :

- RN Pengentasan Kemiskinan
- RB Peningkatan Investasi
- RB Mendorong Hilirisasi
- RB Mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan Kesehatan
- RB Mendukung Ketahanan Pangan
- RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Pendidikan

Kendala dan Upaya Perbaikan

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. Kemenko Bidang Perekonomian Menyusun rencana aksi berdasarkan Surat Edaran Kemenpan RB tentang pelaksanaan RB pada setiap tahunnya, lalu terjadi perubahan RPJMN yang menjadikan keterlambatan Kemenpan RB dalam Menyusun SE ini yang berimplikasi pada keterlambatan K/L dalam Menyusun rencana aksi RB Tematik

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi pembina terkait pelaksanaan agenda dan penilaian nilai Reformasi Birokrasi agar dapat melakukan persiapan yang lebih optimal.
- b. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mempersiapkan pemenuhan bukti dukung penilaian.